

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



**Nama: Tri Kusmiati
NIM: 222015030**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama: Tri Kusmiati
NIM: 222015030**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Kusmiati
Nim : 222015030
Fakultas : Ekonomi
Program studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar , maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang ,
2019

Penulis


Tri Kusmiati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palembang
Nama : Tri Kusmiati
NIM : 222015030
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

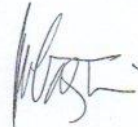
Diterima dan Disahkan
Pada tanggal, 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II



D.R.Sa'adah Siddik, SE.,M.Si,Ak,CA
NIDN/NBM : 0002095507/972321



M.Fahmi, S.E.,M.Si
NIDN/NBM :0029097804

Mengetahui
Dekan
u.b. Ketua Program Studi



Betri Sirajudin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Kesuksesan hanya bisa diraih dengan kita berusaha dan berdo'a, karena sesungguhnya nasib seseorang tidak akan berubah tanpa adanya tekad dari diri sendiri dan berikhtiar kepada Allah.
- Sesungguhnya tidak ada keberhasilan tanpa restu dari orang tua dan ridha Allah, karena adalah salah satu cara untuk mencapainya.

(Tri Kusmiati)

Dengan Rahmat dan Keridhoan Allah Swt,

Kupersembahkan kepada:

- Ayahandaku (Simin Supriyanto) dan Ibuku tercinta (Supiah)
- Pembimbing skripsiku (Ibu DR.Sa'adah Siddik, S.E.,Ak.,M.Si.,CA & Muhammad. Fahmi S.E.,M.Si
- Kepada pembimbing akademik Ibu DR.Sa'dahSiddik, S.E.,Ak.,M.Si.,C
- Mbak-mbakku tercinta (Wiji Astuti) dan (Widaryanti) yang selalu membantu dalam proses pembuatan skripsi.
- Adik-adik sepupuku (Diana Lusintia, Saskia Hikmaya, dan Hafizah Salsabila, aqila, rafi, nisa, disti, afnan,yuyun)
- Almamater ku

PRAKATA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillahirobbilalamain, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Variabel kinerja pemerintah dipilih karena berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan asli daerah lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer yang diterima pemerintah pusat, sehingga kinerja pemerintah dinilai kurang mandiri atau masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kinerja pemerintah Kota Palembang belum mandiri, karena ketergantungan pemerintah Kota Palembang sangat tinggi dengan rata-rata 69%, sedangkan kemandiriannya rendah rata-rata 38% , kinerja derajat desentraliasi pemererintah sedang dengan rata-rata 26%. Transparansi pemerintah Kota Palembang dari segi informasi maupun keterbukaan belum dikatakan baik, sedangkan jika dilihat dari aakuntabilitasnya sudah dikatakan baik.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa banyuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta (Bapakku Simin Supriyanto dan Ibuku Supiah)

serta keluarga yang telah memberi semangat, mendoakan dan memberikan dorongan baik materil maupun spirit yang tiada hentinya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu DR. Sa'dah Siddik, S.E., M.Si, AK,CA dan Bapak Muhammad Fahmi S.E., M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahannya serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE., M.Si., Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta karyawan dan karyawati.
5. Kepala serta pegawai di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang yang dengan tulus mengarahkan dan membantu saya.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ammiin

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatu

Palembang,

2019

Tri Kusmiati

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvi
 BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	8
1. Kinerja.....	8

a.	Pengertian Kinerja	8
b.	Elemen Pokok Pengukuran Kinerja	9
c.	Informasi yang digunakan untuk penilaian kinerja.....	9
d.	Sistem Pengukuran Kinerja.....	10
e.	Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik	10
f.	Indikator Kinerja Pemerintah.....	10
2.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	18
a.	Anggaran pendapatan dan belanja daerah.....	18
b.	Kebijakan penyusunan APBD.....	21
c.	Struktur APBD.....	23
d.	Pelaksanaan APBD.....	24
3.	Kinerja Pengelolaan APBD.....	25
a.	Pengertian kinerja pengelolaan APBD.....	25
b.	Metodologi kinerja pengelolaan APBD.....	25
c.	Instrumen kinerja pengelolaan APBD dan pemberian nilai.....	27
4.	Penelitian Sebelumnya	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian.....	34
B.	Lokasi Penelitian.....	35
C.	Operasionalisasi Variabel	35
D.	Data yang Digunakan.....	36
E.	Metode Pengumpulan Data.....	36
F.	Analisis Data dan Teknik Analisis.....	38

1. Analisis Data.....	38
2. Teknik Analisis	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	41
1. Gambaran Umum BPKAD Kota Palembang.....	41
2. Visi dan Misi	43
3. Struktur Organisasi dan Bagan Struktur Organisasi	44
4. Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian	53
1. Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Palembang ditinjau dari Segi Kemandirian.....	53
2. Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Palembang ditinjau dari Segi Desentralisasi.....	60
3. Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Palembang ditinjau dari Segi Ketergantungan	64
4. Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Palembang ditinjau Berdasarkan Transparansi dan Akuntabilitas.....	71
a. Transaparansi	72
b. Akuntabilitas	74

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan77

B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA79

LAMPIRAN.....81

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Persentase Kinerja Pemerintah Kota Palembang5
Tabel II.1	Pola hubungan, Kemandirian dan Kemampuan Daerah11
Tabel II.2	Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal12
Tabel II.3	Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah13
Tabel II.4	Perbedaan dan Persamaan Penelitian32
Tabel III.1	Operasional Variabel35
Tabel IV.2	Data.....52
Tabel IV.3	Rasio Derajat Kemandirian Kinerja Pemerintah Kota Palembang.....59
Tabel IV.4	Rasio Desentralisasi Kinerja Pemerintah Kota Palembang63
Tabel IV.5	Rasio Ketergantungan Kinerja Kota Palembang.....70

DAFTAR GAMBAR

GambarIV. 1 BaganStruktur Organisasi BPKAD Kota Palembang.....	45
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	81
Lampiran 2 Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	82
Lampiran 3 Surat Pernyataan Selesai Melakukan Penelitian.....	83
Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi	84
Lampiran 5 Sertifikat Hafalan Surat-Surat Pendek.....	85
Lampiran 6 Sertifikat Toefl.....	86
Lampiran 7 Biodata Peneliti.....	87

Abstrak

Tri kusmiati/222015030/Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada badan pengelolaan keuangan daerah Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain bahwa pendapatan asli daerah daerah yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer pemerintah pusat, dan masih kurang atau belum optimal. Kemandirian kinerja Pemerintah Kota Palembang masih rendah dengan rata-rata sebesar 38%, derajat desentralisasi kinerja pemerintah masuk dalam kriteria sedang dengan rata-rata sebesar 26%, ketergantungan kinerja pemerintah Kota Palembang sangat tinggi dengan rata-rata 69%. Dilihat dari segi transparansi belum dikatakan baik karena informasi masih bersifat tertutup sedangkan dilihat dari akuntabilitasnya sudah dapat dikatakan baik.

Kata kunci: kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Abstract

Tri kusmiati / 222015030 / An Analysis of Management Performance of Regional Revenues and Expenditures at the Regional Financial and Asset Management Agency Palembang.

This research is aimed at determining the management performance of regional revenues and expenditures at the regional financial and asset management agency Palembang. The type of the research was a descriptive research. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency Palembang. The variables in this research were performance of regional revenue and expenditure management. The data used were primary data and secondary data with data collection techniques through documented. Based on the results of research conducted on all data obtained at the Regional Financial and Asset Management Agency, several conclusions can be drawn. The original regional income received was smaller than the central government transfer income, and still lacking or optimal. Independence of the performance of Palembang Government was still low with an average of 38%, the degree of decentralization of government performance was included in the medium criteria with an average of 26%, the dependency of the performance of the Palembang government was very high with an average of 69%. In terms of transparency it had not been said to be good because information was still closed while viewed from accountability.

Keywords: performance of the management of the revenue and expenditure budget area

PENGESAHAN

NO. 536 /Abstract/LB/UMP/ VIII / 2019

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah baik akan membuat aset daerah terjaga keutuhannya. Pemerintah daerah yang menjadi pihak dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat wajib untuk menyerahkan atau melaporkan pertanggungjawaban daerahnya untuk dilihat dan dinilai apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah dengan baik atau tidaknya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat suatu keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan.

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial

Analisis kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan suatu daerah. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan serta dilaksanakan. Analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisiensi, dan ekonomis. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi program atau kegiatan. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan keputusan. Ketiga kelembagaan. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat

dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur dan peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja sektor publik sangatlah penting karena bertujuan membantu daerah dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial.

Menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Melalui analisis rasio keuangan pemerintah daerah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah membelanjakan pendapatan daerah dan dapat mengukur APBN.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi meliputi antara lain antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya

ekonomi yang akan diterima untuk mendanai pemerintah suatu daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Sampe sekarang penyusunan APBD masih dilakukan berdasarkan pertimbangan *incremental budget* maka sering mengabaikan kinerja keuangan di APBD. Anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar pada tahap laporan realisasi dapat anggaran diharapkan realisasi pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja memiliki sifat yang relatif mudah dilakukan dan rentan terjadinya inefisiensi dan kebocoran sehingga mungkin anggaran belanja dibuat jauh lebih besar dari suatu potensi realisasi belanja yang sebenarnya. Penggunaan analisis kinerja keuangan digunakan sebagai alat alat keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang sifatnya komersial sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih terbatas. Maka dari itu, perlu suatu perubahan yang mengacu pada penggunaan analisis kinerja keuangandalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Christin Marciah Poyoh (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan belanja keuangan daerah dikarenakan belanja keuangan daerah belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri dan masih terergantung pada pemerintah pusat. Pihak-pihak lain penelitian dilakukan oleh Bahrin Assidiqi menunjukkan bahwa kinerja hasil hasil pendapatan keuangan daerah secara umum sudah baik

walaupun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat tinggi. Sedangkan kinerja keuangan belanja daerah juga sudah baik tetapi belum terjadi keseimbangan antara belanja modal.

Dalam menjalankan aktifitas pemerintah Kota Palembang membutuhkan sumber pendapatan yang nantinya digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja. Berikut disajikan pada Tabel I.1 Kinerja APBD pemerintah Kota Palembang tahun 2014-2018

Tabel I.1
Realisasi APBD Kota Palembang
Tahun Anggaran 2014-2018

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
PENDAPATAN	2.929.034.491.604,27	2.871.899.610.866,10	3.466.134.113.873,28	3.417.593.733.021,39	3.485.838.163.849,88
PENDAPATAN ASLI DAERAH	734.218.688.570,79	736.926.505.928,58	781.413.947.765,14	1.091.704.605.854,90	953.257.612.127,74
Pendapatan Pajak Daerah	463.574.599.151,32	479.112.899.223,00	536.552.681.049,38	680.012.752.910,00	721.012.771.615,00
Pendapatan Retribusi Daerah	85.109.315.505,34	75.646.654.675,36		59.805.678.186,00	48.055.940.847,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	28.021.442.345,64	34.503.218.051,18	50.362.039.101,20	61.860.027.525,97	62.318.561.125,83
Lain-lain PAD yang sah	157.513.331.568,49	147.663.733.979,04		290.026.147.232,83	121.870.338.539,91
PENDAPATAN TRANSEFR	2.094.810.134.822,48	2.124.819.891.737,52	2.132.270.003.171,24	2.307.939.678.493,49	2.376.171.481.107,14
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1.545.294.767.722,00	1.461.824.825.500,00	1.863.736.788.542,00	1.908.214.621.886,00	1.990.567.989.526,00
Dana Bagi Hasil Pajak	95.284.667.535,00	72.151.259.150,00	110.420.544.869,00	85.766.260.921,00	122.359.289.780,00
Dana Bagi Hasil BukanPajak	196.805.369.187,00	0	74.007.376.608,00	121.730.135.012,00	1116.882.059.110,00
DAU	1.203.662.453.000,00	2.210.604.982.000,00	1.292.124.896.000,00	1.269.426.417.000,00	1.269.426.417.000,00
DAK	49.542.278.000,00	82.180.080.000,00	387.183.971.065,00	431.291.808.953,00	481.900.223.636,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	426.003.126.000,00	477.324.745.000,00	0	7.500.000.000,00	25.250.000.000,00
Dana Penyesuaian	426.003.126.000,00	477.324.745.000,00	0	7.500.000.000,00	25.250.000.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROFINSI	123.512.241.100,48	185.670.321.273,52	231.989.411.058,24	392.225.056.607,49	360.353.491.581,14
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	123.512.241.100,48	172.010.165.165,52	21.890.162.845,59	383.384.922.122,49	346.457.350.708,14
Bantuan Keuangan	0	13.660.156.072,00	0	8.840.134.485,00	13.896.140.873,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	100.005.668.211,00	10.153.213.200,00	209.219.176.258,63	17.949.448.673,00	156.409.070.615,00
Pendapatan Hibah	12.362.166.242,00	10.153.213.200,00	1.521.918.000,00	17.949.448.673,00	156.409.070.615,00
Pendapatan Lainnya	87.643.501.969,00	0	0	0	0

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Palembang

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan fenomena bahwa pemerintah Kota Palembang dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2018 masih belum mandiri, karena

pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil dibandingkan dana transfer pemerintah pusat- dana perimbangan. Hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap pemberian dana dari pemerintah pusat dan merupakan masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kota Palembang dimana dalam hal ini pendapatan asli daerah selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Ini mengakibatkan ketimpangan teori dengan kenyataan yaitu semakin tinggi rasio kemandirian pemerintah daerah semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah (Mahmudi, 2016:140).

Merujuk pada transparansi bahwa pemerintah harus terbuka dalam menyediakan dan memberikan akses informasi kepada masyarakat dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang. Namun, pada kenyataannya publik tidak dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah karena pihak BPKAD tidak dapat memberikan data APBD kepada masyarakat secara terbuka.

Merujuk pada akuntabilitas bahwa fenomena BPKAD pemerintah Kota Palembang dapat dilihat dari pelembagaan pengadaan barang dan jasa. Yang sebagaimana didalam BPKAD itu sendiri tidak ada bagian pelembagaan pengadaan barang dan jasa, yang ada hanya pengadaan barang dan jasa. Pelembagaan pengadaan barang dan jasa hanya terdapat disekertaris daerah. Ini merupakan ketimpangan antara indikator akuntabilitas dengan keadaan yang sesungguhnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tersebut tertarik untuk penelitian dengan judul **Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BPKAD Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada BPKAD Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan penelitiannya yaitu yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui analisis kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BPKAD Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini harus mempunyai manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan APBD pada BPKAD Kota Palembang

2. Bagi Pemerintah

Untuk membantu Pemerintah sebagai acuan pengelolaan anggaran kinerja Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah BPKAD Kota Palembang

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto (2007). *Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* 2011. Jakarta
- Arifa khoirul Nima (2017). analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Kesesuaian Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2015. Jurusan *Akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*. Surakarta.
- Assidiqi Bahrhun (2012). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kelaten Tahun 2008-2012. *Jurnal profita* . Yogyakarta.
<http://www.journal.student.uny.ac.id>
- Daling Marchelino (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Kabupaten minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA* Vol1, No 3, September 2013. Hal. 82-89.
<http://www.ejurnal.unsrat.ac.id>
- Fitra Seknas. (2012).*Laporan Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011*. Jakarta
- Halim Abdul, dkk. (2012). *Akuntansi sektor publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Seleba Empat. Jakarta
- Hutami, dkk. (2015). Evaluasi Pelayanan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas sanata Dharma Yogyakarta*. Yogyakarta
- Kmaroellah Agoes. (2017). Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten pamekasan, *jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan*. Pamekasan.
- Liando, dkk. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode value For Money. *Jurnal EMBA*. Vol 2, No 3, September 2014. Hal.1686-1694
<http://www.ejurnal.unsrat.ac.id>
- Mandagi Novita, dkk. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan APBD Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan aset (DPKAPA) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*. Manado.

- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi ke tiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mahsun, Dkk. (2016). *Akuntansi sektor publik*. Cetakan ke enam. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Muchson. (2017). *Metode Riset Akuntansi*. Bogor : Guepedia
- Marciah Christin, dkk (2017). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*. Vol 5 No.2 Juni 2017, Hal 745-752
- Sekaran, Uma. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Baru Press
- Sujarweni wiratna (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Cetakan Pertama . Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press
- Wahyuni Nanik. (2013). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang, *Jurusan Akuntansi fakultas ekonomi Universitas Islam Negeri Maliki Malang*. Malang.